



## Minim Sarjana

**KELEMAHAN** pemerintah daerah (pemda) selama ini dalam pengelolaan anggaran sehingga banyak memperoleh opini yang kurang baik dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebabkan kurangnya sarjana akuntansi, yang dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Demikian diakui Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Wahyudi Basuki pada wartawan beberapa hari lalu di Sangatta.

Padahal, menurutnya, seharusnya tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya memiliki dua orang sarjana akuntansi. "Minimal sarjana akuntansi. Gak usah Akuntan, karena itu sulit. Jadi kami dari BPKP menyarankan agar dalam penerimaan

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

## Minim Sarjana

*Sambungan dari Halaman 16*

pegawai, seharusnya pemda mengutamakan sarjana akuntansi. Sebab ini merupakan kebutuhan yang mendesak, untuk menyusun laporan keuangan di SKPD," kata Bambang.

Dia mengatakan, seharusnya setiap SKPD itu minimal memiliki sarjana akuntansi, agar bisa menyusun laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Karena kalau tidak, maka hasilnya seperti selama ini, laporan keuangan banyak yang sulit diperiksa BPK. Unjung-ujungnya opini laporan keuangan jadi jelek, karena penyusunannya tidak standar.

Bambang mengakui, dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang didampingi BPKP sebagai konsultan keuangan. Hasilnya, cukup bagus. seperti di Kukar, dari awal discamer, langsung jadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Di Kutim, dari disclaimer, dalam dua tahun terakhir ini naik ke opini wajar dengan pengecualian. Hal ini karena BPKP hadir menjelaskan rambu-rambu dan cara pengelolaan keuangan yang benar.

"Kami berharap, kalau semua sudah berjalan dengan baik, maka BPKP tidak akan menjadi konsultan di Pemda lagi," katanya.

Dia pun membantah pan-

dangan jika membaiknya opini hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah yang didampingi karena faktor keberadaan mereka sebagai konsultan.

"Kan yang periksa bukan BPKP, tapi BPK. Jadi membaiknya opini itu karena murni ada perbaikan pengelolaan keuangan. BPKP hadir sebagai konsultan pengelolaan keuangan itu untuk bagi ilmu, karena itu BPKP sering melakukan bimbingan teknik (Bimtek) pengelolaan keuangan pada PNS Pemda. Jadi BPKP hadir sebagai konsultan itu untuk tranfer ilmu pengelolaan keuangan yang standar pada Pemda," katanya. (aj)